

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tanggung jawab pemerintah dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan terdiri dari empat tahap, yaitu: pertama, pencegahan kebakaran hutan dan lahan; kedua, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; ketiga, penegakan hukum; dan keempat, pemulihan kawasan.

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai tanggung jawab pemerintah serta konsep ideal dari tanggung jawab pemerintah dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Dari penelitian ini, ditarik kesimpulan:

1. Tanggung jawab hukum pemerintah dalam aspek pengaturan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan, ditemukan bahwa regulasi yang mengatur tanggung jawab pemerintah telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan turunannya yang memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemerintah untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Sebagai langkah adaptasi, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32/2009 kini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan Menteri ini disusun dengan mempertimbangkan ketentuan pembagian kewenangan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk tanggung jawab hukum pemerintah meliputi tanggung jawab preventif dan responsif, di mana tanggung jawab preventif mencakup upaya-upaya pencegahan melalui penyusunan kebijakan, program edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat, sementara tanggung jawab responsif melibatkan tindakan langsung dalam penanganan kebakaran, termasuk mobilisasi sumber daya untuk pemadaman dan penanganan dampak setelah kebakaran tetapi seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan penegakan hukum yang masih kurang efektif.

2. Tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat diintegrasikan dengan konsep energi berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan energi berkelanjutan dalam kebijakan pengelolaan hutan, pemerintah dapat menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Integrasi energi berkelanjutan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan implementasi konkret dari konsep ideal tanggung jawab hukum yang holistik. Selain itu, restorasi ekosistem yang terdampak kebakaran menjadi tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan prinsip pemulihan. Pada perencanaan dan implementasi kebijakan energi berkelanjutan juga ditekankan adanya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, integrasi energi berkelanjutan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum pemerintah, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan sistem pengelolaan hutan dan energi yang lebih resilien, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## B. Saran

1. Tanggung jawab ini masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kerja sama lintas sektoral dan peningkatan kapasitas institusi terkait. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam pencegahan kebakaran melalui teknologi monitoring, pengawasan ketat terhadap praktik pembakaran lahan, serta penanganan yang cepat dan efektif saat kebakaran terjadi.
2. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan implementasi yang berkelanjutan. Seperti menciptakan regulasi baru yang menghubungkan kedua aspek tersebut. Berhubungan dengan itu perlu dibentuk sistem insentif dan disinsentif yang komprehensif untuk mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan dalam pengelolaan hutan, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan juga diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi berkelanjutan dalam konteks pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

